



Judul : Gerhana di Lingkar Partai Golkar
Tanggal : Selasa, 28 November 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► **KEPEMIMPINAN PARPOL**

Gerhana di Lingkar Partai Golkar

JAKARTA — Pergantian tampuk kepemimpinan di tubuh Partai Golkar ibarat menanti detik-detik gerhana. Kader partai yang diunggulkan mulai muncul dan memperoleh restu sehingga semakin menenggelamkan kiprah Setya Novanto.

*Dewi A. Zuhriyah & Lingga S. Wianto
redaksi@bisnis.com*

Setya Novanto yang sempat berku-kuh tak ingin mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua DPR, dalam waktu tidak lama lagi harus lengser. Sosok Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga putra dari mantan politisi senior Golkar alm. Hartarto Sastroseno, menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Setnov yang terjerat kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dirinya siap ikut dalam kontestasi sebagai calon ketua umum Partai Golkar apabila partai tersebut menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Bahkan, dirinya juga sudah meminta izin Presiden Joko Widodo untuk bertarung dalam pemilihan ketua umum Golkar tersebut.

“Saya minta izin [kepada Presiden] dibolehkan untuk ikut, karena saya kan sekarang pembantu beliau, jadi saya minta izin,” kata Airlangga di Hotel Borobudur, Senin (27/11).

Dia optimistis mampu memperbaiki elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun. “Tentu itu untuk instropeksi saja karena kita tahu penyebabnya apa dan mudah-mudahan kalau ini kita perbaiki bisa kembali pada posisi semula,” ungkapnya.

Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Airlangga bisa menjadi sosok pengganti Setnov dan mengangkat citra partai yang terpuruk akibat stigma korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Menurutnya, eksistensi Partai Golkar menghilang sejak dipimpin oleh pengusaha Aburizal Bakrie dan Setya Novanto.

Partai Golkar cenderung memaksa rakyat mengikuti kepentingan elite partai. Hal itu menyalahi logika politik di mana seharusnya partai politik mengikuti kepentingan masyarakat agar tidak ditinggalkan konstituen.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi resmi menerima pendaftaran permohonan Ketua DPR Setya Novanto untuk melakukan uji materi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkas gugatan teregistrasi dalam dua nomor yakni 95/PUU-XV/2017 untuk menguji Pasal 12 Ayat 1 UU KPK dan nomor 96/PUU-XV/2017 untuk menguji Pasal 46 Ayat 1 dan Ayat 2 UU KPK. Kedua pasal tersebut dianggap merugikan hak konstitusional Setnov yang tengah



Bienis/Husin Parapat/Amri Hudayat

Nur
hayati yang
juga Wakil Ketua
Umum Partai Demokrat

tersebut mengatakan pihaknya
masih menunggu proses hukum
Setnov. Dia juga mengatakan harus
menjawab pertanyaan parlemen asing
tersebut dengan sangat hati-hati.

“Mereka mendengar ketua DPR RI
tertangkap kasus korupsi, menanyakan
statusnya, apakah sudah diproses dan
sebagainya. Karena kebetulan sekarang
ini DPR menjadi Ketua Global Parlemen
ary Against Corruption, jadi kita harus
menjawabnya dengan sangat hati-hati,”
katanya. (Irene Agustine/Samdysara Saragih) 

disidik dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto dari firma Yunadi and Associates, membenarkan berkas permohonan kliennya dilayangkan sebanyak dua kali. Pasalnya, kedua pasal yang digugat berbeda secara materi sehingga berkas perkara dipisahkan.

“Mengenai berkas permohonan, tidak ada kewajiban dibuka untuk umum. Tunggu saja nanti pas di persidangan,” katanya kepada *Bisnis*, Senin (27/11).

Setnov menggugat Pasal 12 Ayat 1 yang berisi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK. Salah satu kewenangan lembaga antirasuah itu adalah memerintahkan otoritas imigrasi untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menyatakan lembaganya menerima banyak surat dari parlemen luar negeri yang mempertanyakan status Ketua DPR, Setya Novanto.

Nurhayati menjelaskan bahwa mayoritas surat tersebut meminta penjelasan soal status dan kelanjutan proses hukum kasus korupsi proyek KTP elektronik

yang menerima Setnov
yang diduga merugikan negara sampai
Rp2,3 triliun.

“Kami mendapatkan banyak sekali surat dari parlemen-parlemen luar negeri yang menanyakan bagaimana kejelasan kasus Novanto. Ini kami masih menunggu jawaban karena menjadi bagian dari tugas diplomasi parlemen,” katanya, usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.